



**RENCANA KERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT
KOTA BANJARBARU
TAUHN 2022**



SEKRETARIAT DPRD KOTA BANJARBARU
ALAMAT : Jl. Basuki Rahmat No. 3 Telp. (0511) 4781789 Fax. 4781539

**RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT
DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARBARU
TAHUN 2022**



SEKRETARIAT DPRD KOTA BANJARBARU

Jl. Basuki Rahmat No. 3 Telp. (0511) 4781789 Fax. 4781539



**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR : 62 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
(RENJA) SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU
TAHUN 2022**



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Alamat Kantor : : Jl. BASUKI RAHMAD NO. 3 TLP. (0511)4781789-
4781539 FX. 4781539 BANJARBARU 70711

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
NOMOR 062 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARBARU TAHUN 2022

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022;
- b. bahwa Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) seperti dimaksud pada huruf a tersebut di atas bertugas mengumpulkan, menyiapkan dan menyusun bahan dalam rangka penyusunan Renja sehingga tersusun Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 yang merupakan suatu dokumen perencanaan yang akan dipedomani oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022;
- c. bahwa Penunjukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 seperti dimaksud huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dan diundangkan tanggal 30 Desember 2020 (No Register Provinsi 16.114/2019);
13. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran ditetapkan dan diundangkan tanggal 30 Desember 2020

Memperhatikan :

Surat Edaran nomor : 050 / 0175 – Sunram & Eva / Bappeda tentang Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)SKPD Kota Banjarbaru Tahun 2022.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

KESATU :

Keputusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru tentang Penunjukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022, dengan Daftar Nama tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA :

Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas mengumpulkan, menyiapkan dan menyusun bahan dalam rangka penyusunan Renja sehingga tersusun Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 sebagai berikut :

KETIGA :

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 3 Maret 2021

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Banjarbaru

H.AIDA YUNANI, S. Sos, MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 19650929 198603 1 019

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Banjarbaru di Banjarbaru.
2. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru di Banjarbaru.
3. Inspektur Kota Banjarbaru di Banjarbaru.
4. Yang bersangkutan

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Banjarbaru
Nomor : 62 tahun 2021
Tanggal : 3 Maret 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Penanggung Jawab	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru
2.	Ketua	Kepala Bagian Umum
3.	Sekretaris I	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan;
4.	Sekretaris II	Kepala Bagian Persidangan dan Risalah
5.	Anggota :	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
		Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
		Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol.
		Kepala Sub Bagian Persidangan;
		Kepala Sub Bagian Risalah dan Pelaporan;
		Kepala Sub Bagian Pengkajian Perundang-undangan.
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
		Kepala Sub Bagian Anggaran dan Verifikasi;
		Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan
6.	Sekretariat	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan a. Susiawati, SE NIP. 19760220 200701 1 010 b. Zainab. A.Ma NIP. 198202 201406 1 002 c. Risna Erliana, SE NRPTT.857058304

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Banjarbaru,

H.AIDA YUNANI, S. Sos, MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 19650929 198603 1 019

**SEKRETARIAT DPRD KOTA BANJARBARU
TAHUN 2021**



**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR : 063 TAHUN 2021**

**TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARBARU
TAHUN 2022**



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Alamat : Jalan Basuki Rahmat Nomor 3 Banjarbaru Kode Pos 70711

Telepon.(0511) 4781789, 4781620 Faks. (0511) 4781539

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
NOMOR 063 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KOTA BANJARBARU TAHUN 2022

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARBARU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022;
- b. Bahwa Rencana Kerja (Renja) seperti dimaksud pada huruf a tersebut di atas adalah merupakan suatu dokumen perencanaan yang akan dipedomani oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022;
- c. bahwa Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 seperti dimaksud huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dan diundangkan tanggal 30 Desember 2020 (No Register Provinsi 16.114/2019;
13. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran ditetapkan dan diundangkan tanggal 30 Desember 2020

Memperhatikan : Surat Edaran nomor : 050 / 0175 – Sunram & Eva / Bappeda tentang Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)SKPD Kota Banjarbaru Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru tentang Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022.
- KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 3 Maret 2021

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Banjarbaru

H.AIDA YUNANI, S. Sos, MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 19650929 198603 1 019

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Banjarbaru di Banjarbaru.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru di Banjarbaru.
3. Inspektur Kota Banjarbaru di Banjarbaru

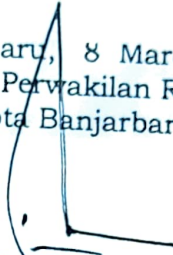
KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian dokumen Renja ini.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 disusun dalam rangka memenuhi Akuntabilitas kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru, sebagaimana yang tertuang dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dokumen Rencana Kerja (Renja) ini juga diharapkan dapat memberikan arah kepada segenap karyawan dan manajemen Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 ini masih belum sempurna, segala komentar, saran, kritik maupun tanggapan Rencana Kerja (Renja) ini sangat diharapkan demi kesempurnaannya.

Banjarbaru, 8 Maret 2021
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Banjarbaru,


H. AIDA KUNANI, S.Sos, MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 19650929 198603 1 019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	22
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	29
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	30
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	40
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	44
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	44
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru	44
3.3. Program dan Kegiatan	45
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	54
Penjelasan Rencana Kerja dan Pendanaan Pada Program Prioritas	
BAB V. PENUTUP	63
LAMPIRAN	

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2022 ini yang merupakan tahun kedua pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dan Surat Edaran nomor : 050 / 0175 - Sunram & Eva / BAPPEDA tentang Penyusunan Rencanaan (RENJA) SKPD Kota Banjarbaru Tahun 2022.

antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru merupakan dokumen rencana pembangunan masing-masing SKPD yang berjangka 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota

Banjarbaru, dimana Renja Sekretariat DPRD ini merupakan barometer pelaksanaan perencanaan tahun berjalan.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru Tahun 2022, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum adalah :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021;
5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D No. Seri 1).
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D No. Seri 1).

7. Surat Edaran nomor : 050 / 0175 – Sunram & Eva / BAPPEDA tentang Penyusunan Rencana (RENJA) SKPD Kota Banjarbaru Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja SKPD Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru Tahun 2022 dimaksudkan untuk mengoperasikan RKP daerah disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan yang sudah dicapai Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru dengan memperhatikan berbagai perkembangan didalam maupun diluar Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru.

b. Tujuan

1. Agar Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru memiliki Rencana Kerja (RENJA SKPD) tahun 2022 yang relevan dan konsisten untuk melaksanakan program dan kegiatan yang sudah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Renja SKPD Tahun 2022 ini merupakan acuan dan pedoman bagi setiap Bagian di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru dalam memberikan pelayanan dan memfasilitasi baik kepada Dewan maupun Masyarakat.

1.4. Sistematika

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD,

berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal, ada bagian Ini berisikan perbandingan RKPD 2020 dengan rancangan Awal Usulan RKPD Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program / kegiatan Dewan dan Sekretariat DPRD untuk mendukung kebijakan "Optimalisasi Kinerja Pemerintah Daerah "

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD

3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai rencana kerja dan pendanaan daerah, memuat Program, kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB> V. PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Pada bagian terdahulu telah dikemukakan bahwa Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya membantu kepala daerah dibidang pelayanan terhadap DPRD telah menetapkan arah kebijakan sebagaimana yang tertuang dalam rencana strategis, dimana walaupun pada tataran pelaksanaannya dalam kurun waktu tahun 2022 masih terdapat permasalahan dan kendala yang dihadapi, namun dari hasil evaluasi sebagian besar kegiatan telah terfasilitasi kearah sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun uraian hasil evaluasi dimaksud, dapat disajikan sebagai berikut:

a. Program peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pelaksanaan program ini berdasarkan hasil Evaluasi secara umum terlaksana Capaian Kinerja dengan kategori baik dengan tingkat prosentase mencapai 97,48 %.

Sementara dari sisi anggaran untuk program ini sesuai rencana disediakan anggaran sebesar Rp.3.931.134.746,- namun setelah dilaksanakan terealisasi sebesar Rp.3.100.882.258,- sehingga dengan demikian capaian penyerapan anggaran sebesar Rp. 78.88%

b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program ini secara umum Capaian Kinerja dapat dicapai dengan kategori baik dengan tingkat prosentase kegiatan sebesar 88.41%.

Sedangkan dari sisi anggaran untuk kegiatan program ini sesuai rencana dianggarkan sebesar Rp 2.237.360.760,- , namun setelah dilaksanakan terealisasi sebesar Rp. 1.885.591.371,- sehingga dengan demikian capaian penyerapan anggaran sebesar 84%.

c. Program peningkatan Disiplin Aparatur.

Pelaksanaan terhadap program ini berdasarkan hasil evaluasi Capaian Kinerja pada tahun 2019 juga dapat tercapai dengan kategori baik dengan tingkat capaian sebesar 100 %, ini berarti jika dibanding dengan capaian tahun sebelumnya adalah sama sebesar 100%.

Sementara Tahun 2020 pada sisi anggaran dari dana yang dialokasikan sebesar Rp.368.000.880.000,- terealisasi sebesar Rp.307.260.000,- atau 83 %

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Pelaksanaan terhadap program ini berdasarkan hasil evaluasi pada tahun 2019 Capaian Kinerja juga dapat tercapai dengan kategori baik dengan tingkat capaian sebesar 100 %, ini berarti jika dibanding dengan capaian tahun sebelumnya adalah sama sebesar 100 %.

Sementara pada sisi anggaran dari dana yang dialokasikan sebesar Rp. 175.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 146.078.600,- atau 83.47 %

e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Pelaksanaan program ini pada tahun 2019 Capaian Kinerja juga tercapai dengan kategori baik dengan tingkat capaian yaitu sebesar 100 %.

Sedangkan dari sisi keuangan dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 72.197.050,- . Direalisasikan sebesar Rp. 67.229.950,- sehingga penyerapan anggaran mencapai Rp. 93%.

f. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah,

Program ini presentase kinerja 147,7 % dengan alokasi dana sebesar Rp. 16.407.560.750,- dan yang terealisasi Rp. 13.626.745.954'. atau 83% dana yang terserap. Program ini mempunyai 6 (enam) kegiatan yang capaian kinerjanya dengan target kinerja pada tahun 2020 ini dapat dijelaskan sebagai berikut Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;

1. Pembahasan rancangan peraturan daerah;

Pada tahun 2020 ini jumlah rapat terlaksana sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) kali lebih dari yang targetkan yaitu 120 (seratus dua puluh) kali rapat, hal ini disebabkan karena adanya pembahasan raperad yang memerlukan waktu lebih dalam penyelesaiannya dan telah menghasilkan 12 buah Raperda kota Banjarbaru. Untuk pencapaian kinerja lebih dari 104%. Dan dari sisi keuangan capaiannya dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 3.943.147.750,- yang direalisasikan sebesar Rp. 2.978.354.908,-.atau 76% dana yang terserap.

2. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan tokoh agama; terlaksana sebanyak 9 kali kegiatan dari yang ditargetkan sebelumnya berjumlah 18 kali kegiatan. Hal ini disebabkan karena masih dalam suasana covid 19 yang mana adanya pembatasan sosial, sehingga hanya beberapa orang yang hadir dalam mengikuti kegiatan hearing ini sehingga capaian kinerja yang dicapai hanya 50% dan dana yang terserap hanya 18,58% yaitu dengan dana sebesar Rp. 15.790.000,- dari yang di anggarkan sebesar Rp. 85.000.000,-. Dan juga kegiatan tersebut dilaksanakan disela-sela pelaksanaan rapat kerja dengan SKPD .
3. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan;
Terlaksana sebanyak 240 kali kegiatan yang terdiri dari kegiatan, komisi I,II dan III serta kegiatan Badan Pembentukan perda dan Badan kehormatan (BK). Rapat terlaksana lebih dari yang ditargetkan sebanyak 200 kali hal ini disebabkan karena masih dalam masa pandemi virus corona yang mengharuskan fisik distancing (jaga jarak) sehingga dilakukan pembatasan anggota rapat yang pada akhirnya seharusnya rapat dilakukan satu kali bisa jadi dua kali rapat . Sementara dari dana yang dialokasikan sebesar Rp.324.061.500 dan yang terealisasi Rp. 308.668.100 Atau dana yang terserap 95.25% dengan capaian kinerja 120%.
4. Kegiatan Reses; Dilaksanakan 3 kali oleh Anggota DPRD kota Banjarbaru sesuai dengan Daerah pemilihan masing-masing. Dan capaian kinerjanya terlaksana 100% dengan realisasi dana Rp. 1.374.033.750 dengan anggaran 1.550.917.250,- atau 89%.
5. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam Daerah;
Terlaksana sebanyak 12 kali kegiatan dengan tingkat capaian

100%. Sementara dari dana yang dialokasikan sebesar Rp. 294.048.500.- dan yang terealisasi sebesar Rp 175.057.789,- atau 59,53% disebabkan masih dalam suasana covid sehingga kunjungan kerja ke daerah-daerah yang jaraknya terdekat saja.

6. Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD;

Capaian Kinerja untuk Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD terlaksana 100% dengan jumlah kegiatan 55 kali sesuai dengan yang direncanakan dari dana yang dialokasikan sebesar Rp. 10.210.385.750,-, dengan realisasi sebesar Rp 8.774.841.407.- atau 88%.

g). Penataan Peraturan Perundang-Undangan, dengan penyerapan dana sekitar 73,60% dari sisi keuangan anggaran yang sediakan sebesar Rp. 387.898.750,- Direalisasikan sebesar Rp. 285.500.000. Dari program yang telah direncanakan umumnya dilaksanakan semua dengan capaian kinerja 66,67%. Sedangkan untuk kegiatan penanganan kasus pengaduan dan penyelesaian sengketa hukum memang tidak dilaksanakan karena tidak ditemukan kasus.

h. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

Pelaksanaan program ini terlaksana dengan tingkat prosentase sebesar 100 %.

Sementara dari sisi anggaran untuk program ini sesuai rencana disediakan anggaran sebesar Rp.950.720.000,- namun setelah dilaksanakan terealisasi sebesar Rp. 857.994.000,- sehingga dengan demikian capaian penyerapan anggaran sebesar 90 %

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan sampai dengan bulan maret tahun 2021 adalah :

**I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA**

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Kegiatan | : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah |
| Anggaran | : 100 % |
| Penyelesaian Pekerjaan | : Rp. 41.866.750,- |
| Realisasi | : Rp. 1.771.900,- |
| Prosentase Realisasi | : 4.23 % |
| 2. Kegiatan | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| Penyelesaian Pekerjaan | 100 % |
| Anggaran | Rp. 3.771.213.948,- |
| Realisasi | Rp. 680.256.769.- |
| Prosentase Realisasi | 18.04 % |
| 3. Kegiatan | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
| Penyelesaian Pekerjaan | 100 % |
| Anggaran | Rp. 358.789.000, |
| Realisasi | Rp. - |
| Prosentase Realisasi | 0% |

4.	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Penyelesaian Pekerjaan	100 %
	Anggaran	Rp. 2.485.707.370,-
	Realisasi	Rp. 198.684.600,-
	Prosentase Realisasi	7,99 %
5.	Kegiatan	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyelesaian Pekerjaan	100 %
	Anggaran	Rp. 2.895.185.000,-
	Realisasi	Rp 45.140.000
	Prosentase Realisasi	1,56%
6.	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyelesaian Pekerjaan	100 %
	Anggaran	Rp. 911.280.000,-
	Realisasi	Rp. 74.610.167,-
	Prosentase Realisasi	8,19 %
7.	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyelesaian Pekerjaan	100 %
	Anggaran	Rp. 1.471.199.000,-
	Realisasi	Rp. 38.093.037,-
	Prosentase Realisasi	2.59 %

8.	Kegiatan	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
	Penyelesaian Pekerjaan	100 %
	Anggaran	Rp. 17.451.611.020,-
	Realisasi	Rp. 1.285.241.373,-
	Prosentase Realisasi	7,36 %
9.	Kegiatan	Layanan Administrasi DPRD
	Penyelesaian Pekerjaan	100%
	Anggaran	414.660.000,-
	Realisasi	0
	Prosentase Realisasi	0 %

II. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

10.	Kegiatan	: Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
	Anggaran	: 100 %
	Penyelesaian Pekerjaan	: Rp. 4.595.285.000,-
	Realisasi	: Rp. 378.156.366,-
	Prosentase Realisasi	: 8.23 %

11. Kegiatan	Peningkatan Kapasitas DPRD Daerah
Penyelesaian Pekerjaan	100 %
Anggaran	Rp. 5.278.576.000,-
Realisasi	Rp. 53.612.000.-
Prosentase Realisasi	1,02%
12. Kegiatan	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi masyarakat
Penyelesaian Pekerjaan	100 %
Anggaran	Rp. 2.841.320.000.-
Realisasi	Rp. 581.965.000.-
Prosentase Realisasi	23 %
13. Kegiatan	Fasilitasi Tugas DPRD
Penyelesaian Pekerjaan	100 %
Anggaran	Rp. 11.266.495.800,-
Realisasi	Rp. 411.017.000,-
Prosentase Realisasi	3.65 %

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Penyampaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru s/d Tahun 2020 (Tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 1 dibawah ini

Kode	Unsur/Bidang Unsur Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan 5/10 tahun 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2020			Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021		Prestasi Realisasi Capaian Target Renstra SKPD 1/4 tahun berjalan		Catatan
			4	3	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (9-7/9)	11 = (10/9)	12		
4.02.01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	pendiri akuntabilitas kinerja perangkat daerah	BB	29.033.054.424	C	8.774.292.652	B	25.577.200.716	0	21.745.756.477	100%	8	40.321.551.217	8
		Coluapan pelayanan internal yang efisien	WTP		WTP		WTP		WTP		100% WTP			
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD	100 %	46.030.000	100 %	89.533.300	100 %	62.925.550	100 %	62.279.950	100 %	100 %	187.679.000	1
4.02.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yg terasun sesuai ketentuan	2 Dok	11.000.000	6 Dok	26.392.500	10 Dok	20.285.750	10 Dok	20.285.750	100 %	2 Dok	56.678.250	9
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jml Dok DPA-SKPD yang terasun sesuai ketentuan	11 Dok	23.730.000	11 Dok	42.769.800	13 Dok	33.439.800	13 Dok	32.794.200	100 %	11 Dok	97.145.000	3
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator	Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang terasun sesuai ketentuan	3 Dok	11.300.000	3 Dok	14.370.000	3 Dok	9.200.000	3 Dok	9.200.000	100 %	3 Dok	31.855.750	3
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan	Penyusunan laporan keuangan yang disusun jml ASN yang menerima gaji dan tunjangan tetap	100 %	4.109.604.418	100 %	3.452.626.569	100 %	3.629.668.800	100 %	3.396.389.383	100 %	100 %	10.620.229.900	3
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jml ASN yang menerima gaji dan tunjangan tetap	33 org	4.086.237.918	14 Bln	3.441.881.569	14 Bln	3.620.397.390	14 Bln	3.391.439.383	14	14 Bln	10.533.568.400	1
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Tahunan SKPD	Jml Lap keuangan SKPD yang disusun di akhir tahun sesuai ketentuan.	1 Dok	60.680.000	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0	1 Dok	58.280.000	1
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan/Budanan/Truwidun/s emesteran SKPD	Jml Lap Keuangan SKPD yang disusun secara berkala sesuai ketentuan.	3 Dok	12.686.500	2 Dok	10.745.000	2 Dok	9.271.500	2 Dok	4.950.000	100 %	3 Dok	28.381.500	2
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Penyusunan laporan hasil bimbingan teknis dan pelatihan	100 %	483.650.000	100 %	754.790.300	100 %	175.000.000	100 %	146.078.600	100 %	100 %	1.159.657.900	3
4.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Daerah/Peperai	Jml pelaksanaan dinas Pemdai dan ASN beserta atribut kelengkapannya yg tersedia	100 Stel	25.450.000	0	-	0	-	0	Buah	MDN/01	100 lbr	25.450.000	1
4.02.01.2.05.01	Dinas Besar	Jml pelaksanaan dinas Pemdai dan ASN beserta atribut kelengkapannya yg tersedia	30 Stel	8.100.000	283 Stel	620.000.500	0 Stel	-	-	Stel	MDN/01	6 Stel	628.500.500	10
4.02.01.2.05.02	Bimbingan Teknis	Jml ASN yang telah mengikuti Bimtek	54 org	450.100.000	3 Kali	134.389.800	1 Kali	175.000.000	1 Kali	146.078.600	100 %	3 Kali	605.707.400	0
4.02.01.2.05.11	Peraturan Perundang-Undangan												355.239.000	

4.02.01.2.06	Administrasi Umum	Cakupan Layanan	100 %	1.174.614.170	100 %	2.486.383.765	100 %	2.593.854.746	100 %	2.887.442.662	100 %	2.885.702.379	300	7.059.883.197	3
4.02.01.2.06.02	Pemeliharaan dan Perbaikan Kantor	Jmh Perawatan dan Perbaikan Kantor yg terasda	2427 Bt/Pa ke/K tk/Un R	322.963.170	12 bin	345.937.489	12 bin	301.643.750	100	12 bin	16	870.889.470	0		
4.02.01.2.06.04	Pemeliharaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan Bahan Logistik Kantor yang terasda	3592 Bt/Pa ke/K tk/Un R/nim	376.568.000	12 bin	450.571.000	12 bin	428.843.800	100	12 bin	36	1.159.446.100	0		
4.02.01.2.06.05	Pemeliharaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak yang terasda	4020 Bt/Pa ke/K tk/Un R/nim	129.985.000	12 bin	129.985.000	12 bin	118.810.000	100	12 bin	36	264.262.700	0		
4.02.01.2.06.06	Pemeliharaan Bahan dan Perawatan Perundang-Undangan	Jumlah Pengandaan yang terasda	1674 lb					96.000.000	100	12 bin	36	304.078.000	0		
4.02.01.2.06.07	Pemeliharaan Bahan dan Perawatan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bahan atau buku peraturan perundang-undangan yang terasda	24444 eks	58.010.000	12 bin	96.000.000	12 bin	96.000.000	100	12 bin	36	304.078.000	0		
4.02.01.2.06.08	Pemeliharaan Bahan dan Perawatan Perundang-Undangan	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	160 lap	297.100.000	1 thn	1.882.785.265	1 thn	1.571.360.359	100	1 thn	14	4.511.033.677	0		
4.02.01.2.06.09	Pemeliharaan Bahan dan Perawatan Perundang-Undangan	Rapor Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Thn	38.000.000								1.486.124.200			
4.02.01.2.06.10	Pemeliharaan Bahan dan Perawatan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Arsip Dinamis pada SKPD	1 Thn												
4.02.01.2.07	Cakupan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	916.534.000	100 %	925.250.000	100 %	920.005.000	100	100 %	300	2.895.185.000	300	4.007.535.000	3
4.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaran	Jmh Kendaran Dinas & Operasional atau lapangan yg dibeli	1 Unit	456.000.000	2 unit	868.805.000	0		0	0	0	1.029.445.000	7	2.978.770.000	7
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jmh mebel yg dibeli	15 Bt/P aeri/ unit/ srt	106.405.000	jenis	137.220.000	4 jenis		4 jenis	100	2 jenis	6	364.475.000	0	
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jmh peralatan dan mesin lainnya yg dibeli	35 Bt/P aeri/ unit/ srt	314.129.000	jenis	773.470.000	5 jenis	773.470.000	100	11 jenis	18	1.220.015.000	0		
4.02.01.2.07.11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jmh pengadaan sarana dan prasarana pendukung Kantor atau Bangunan lainnya yang terbangun	0		jenis	98.020.000	2 jenis	14.560.000	100	5 jenis	11	413.530.000	0		
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.126.900.000	100 %	521.022.234	100 %	1.177.280.000	100 %	1.083.170.196	300	911.386.000	300	2.435.472.430	3
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	pasd difasilitasi	4 macan	454.570.000	12 bin	279.852.234	12 bin	309.120.000	100	12 bin	36	413.200.000	36	920.872.430	3
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jmh pegawai administrasi non ASN aktif	16 org	671.780.000	12 bin	247.170.000	12 bin	868.600.000	100	12 bin	24	488.080.000	24	1.514.500.000	2
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa pelayanan umum kantor lainnya	9 org												
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100 %	2.083.914.000	100 %	564.613.884	100 %	1.313.110.760	100 %	1.471.188.000	300	3.001.388.153	300	3.001.388.153	3

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelayanan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sekretariat DPRD juga mempunyai fungsi pelayanan terhadap DPRD Kota Banjarbaru, dimana secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota Banjarbaru dan secara operasional kepada Pimpinan DPRD Kota Banjarbaru, disamping itu Sekretariat DPRD memfasilitasi tugas dan fungsi Dewan dalam hal legislasi, anggaran dan pengawasan, sehingga perlu adanya upaya :

1. Meningkatkan kompetensi dan menambah SDM untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel dibidangnya;

Meningkatkan pemamfaatan teknologi informasi sebagai salah satu media publikasi kepada masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan DPRD;

2. Menjadikan keberadaan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD sebagai wahana untuk mengatasi masih adanya intervensi pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD.

Hasil analisis pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru yang disesuaikan menurut SKPD masing-masing dapat disajikan pada tabel 2 sebagai berikut :

Table 2
 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru
 Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analitis
		Tahun 2020	Tahun (n-1) 2021	Tahun (n-2) 2022	Tahun (n-1) 2023	Tahun 2020	Tahun (n-1) 2021	Tahun (n-2) 2022	Tahun (n-1) 2023		
1	predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	B	B	BB	B	BB	BB	BB	BB		
A	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		
I	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
	Persentase Perencanaan Penganggaran yang responsif gender	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
1	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SKPD yg tersusun sesuai ketentuan	10 Dok	2 Dok	2 Dok	10 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok		
2	Jmh Dok.DPA-SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	13 Dok	11 Dok	11 Dok	13 Dok	11 Dok	11 Dok	11 Dok	11 Dok		
3	Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok		
II	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
4	Jmh ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu.	14 Bln	14 Bln	33 org	14 Bln	33 org	33 org	33 org	33 org		

	I Thn	I Thn	I Thn	I Thn	I Thn	I Thn	I Thn	I Thn	I Thn	I Thn	I Thn
15	Jumlah Dokumen Arsip Dinamis Pada SKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
V	Cakupan Sarang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
15	Jmh Kendaraan Dinas & Operasional atau lapangan yg dibeli	0	5 unit	1 unit	-	0	5 unit	1 unit	-	1 unit	-
16	jmh mebel yg dibeli	4 jenis	2 jenis	15 Bh/Paket/ Unit/set	17 Bh/Paket/ Unit/set	4 jenis	5 jenis	15 Bh/Paket/ Unit/set	17 Bh/Paket/ Unit/set	15 Bh/Paket/ Unit/set	17 Bh/Paket/ Unit/set
17	jmh peralatan dan mesin lainnya yg dibeli	5 jenis	11 jenis	35 Bh/Paket/ Unit/set	34 Bh/Paket/ Unit/set	5 jenis	11 jenis	35 Bh/Paket/ Unit/set	34 Bh/Paket/ Unit/set	35 Bh/Paket/ Unit/set	34 Bh/Paket/ Unit/set
18	jmh pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terbangun	2 jenis	9 jenis	9 Bh/Paket/ Unit/set	9 Bh/Paket/ Unit/set	2 jenis	9 jenis	9 Bh/Paket/ Unit/set	9 Bh/Paket/ Unit/set	9 Bh/Paket/ Unit/set	9 Bh/Paket/ Unit/set
VI	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah yg difasilitasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
19	Jumlah Jasa Komunikasi,sumber daya air & listrik dan lainnya yang dapat digunakan	12 bin	12 bin	4 macam	4 macam	12	0	4 macam	4 macam	4 macam	4 macam
20	Jmh pegawai administrasi non ASN aktif	12 bin	12 bin	16 org	16 org	16 org	16 org	16 org	16 org	16 org	16 org
VII	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Jasa pelayanan umum kantor lainnya	9 org	9 org	9 org	9 org	12 bin	12 bin	9 org	9 org	9 org	9 org

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Permasalahan-permasalahan yang sering muncul sehingga dijadikan isu yang strategis berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan kompetensi Sumber daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kerja DPRD melalui pemampaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.
2. Optimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan
3. Belum tersedianya standar / manual / pedoman dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dan dukungan sesuai standar terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD
4. Makin tingginya tuntutan peningkatan kualitas dan efektifitas pelayanan serta dukungan , yang dibebankan kepada Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru guna peningkatan Kapasitas DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Sekretariat. Disamping itu berpegang pada rancangan awal RKPD tahun 2020 yang merupakan komitmen Pemerintah Kota Banjarbaru untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan. Dimana penyusunan RKPD tahun 2020 dilaksanakan melalui 3 tahapan yaitu penyusunan Rancangan Awal RKPD, penyusunan Rancangan RKPD dan penyusunan Perwali RKPD dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, bottom-up dan top-down. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar urusan pemerintahan maupun Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Selain itu telah ditetapkan Rencana Kinerja dengan Penetapan Kinerja yang merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru. Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Adapun Visi *Walikota Banjarbaru*

Kota Banjarbaru yang ditetapkan untuk Tahun 2021 – 2026, yaitu

“ Banjarbaru Maju ,Agamis dan Sejahtera “

MAJU :

ADALAH KOMITMEN UNTUK MENJADIKAN BANJARBARU MEMPUNYAI
DAYA SAING DENGAN DAERAH LAINNYA MELALUI PENGEMBANGAN
SEGALA POTENSI.

AGAMIS :

ADALAH TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANJARBARU YANG AGAMIS,
BERAHLAK MULIA DAN BERBUDI PEKERTI LUHUR

SEJAHTERA

ADALAH SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS, MENUMBUH
KEMBANGKAN EKONOMI DAERAH, LINGKUNGAN YANG SEHAT DAN
PEMERINTAHAN YANG BAIK.

Berkaitan dengan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 – 2026, maka misi yang berkaitan langsung dengan Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru adalah Misi 3 Yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang amanah dengan tujuan pembangunan yang menjadi pedoman Sekretariat DPRD dalam Periode 2021-2026 yaitu terwujudnya Pemerintahan yang Efektif, efisien, akuntabel dan Bebas KKN yaitu meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Derah tujuan tersebut menjadi pedoman bagi peningkatan kualitas fasilitasi dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kota Banjarbaru.

Berikut ini disajikan tabel Review terhadap Rancangan awal RKPD tahun 2021 sampai dengan Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru sebagai berikut pada tabel 3 ;

Tabel 3
Revisi Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kota Banjarbaru

No.	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting	
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Bjb	predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	BB	12.325.790.088	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Bjb	predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	BB	32.811.373.000	12
A		Bjb	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	WTP			Bjb	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	WTP		
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Bjb	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, dan penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD	100 %	46.030.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Bjb	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, dan penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD	100 %	46.030.000	
			Persentase Perencanaan Penganggaran yang responsif gender					Persentase Perencanaan Penganggaran yang responsif gender			
1	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bjb	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SKPD yg tersusun sesuai ketentuan	2 Dok	11.000.000	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bjb	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SKPD yg tersusun sesuai ketentuan	2 Dok	11.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Bjb	Jmh Dok.DPA-SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	11 Dok	23.730.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Bjb	Jmh Dok.DPA-SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	11 Dok	23.730.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Bjb	Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	3 Dok	11.300.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Bjb	Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	3 Dok	11.300.000	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bjb	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100 %	4.109.604.418	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bjb	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100 %	4.310.155.000	

No.	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Keberhasilan				Catatan Penting	
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3	Jmh ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu.	33 org	4.036.237.918	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bjb	Jmh ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu.	33 org	4.232.100.000
4	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bjb	Jmh Lap Keuangan SKPD yang disusun di akhir tahun sesuai ketentuan.	1 Dok	60.680.000	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bjb	Jmh Lap Keuangan SKPD yang disusun di akhir tahun sesuai ketentuan.	1 Dok	64.100.000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD	Bjb	Jmh Lap Keuangan SKPD yang disusun secara berkala sesuai ketentuan.	3 Dok	12.686.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /semesteran SKPD	Bjb	Jmh Lap Keuangan SKPD yang disusun secara berkala sesuai ketentuan.	3 Dok	13.955.000
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bjb	Persentase ASN yang mengimplementasikan hasil bimtek dan diklatnya	100 %	483.650.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bjb	Persentase ASN yang mengimplementasikan hasil bimtek dan diklatnya	100 %	856.220.000
7	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Bjb	Jmh pakaian batik/sasirangan yang tersedia	100 Stel	25.450.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Bjb	Jmh pakaian batik/sasirangan yang tersedia	100 Stel	40.000.000
8	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya	Bjb	Jmh pakaian dinas Pamdal dan ASN beserta atribut kelengkapannya yg tersedia	30 Stel	8.100.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya	Bjb	Jmh pakaian dinas Pamdal dan ASN beserta atribut kelengkapannya yg tersedia	30 Stel	40.500.000
9	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bjb	Jmh ASN yang telah mengikuti Bimtek	54 org	450.100.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bjb	Jmh ASN yang telah mengikuti Bimtek	54 org	775.720.000
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bjb	Cakupan Layanan Administrasi Umum yang difasilitasi	100 %	1.174.614.170	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bjb	Cakupan Layanan Administrasi Umum yang difasilitasi	100 %	2.283.843.000
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bjb	Jmh Peralatan dan Perlengkapan Kantor yg tersedia	2427 Bh.Paket/Ktk/Unit	222.963.170	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bjb	Jmh Peralatan dan Perlengkapan Kantor yg tersedia	2427 Bh.Paket/Ktk/Unit	421.335.000

Rancangan Awal RKP										Hasil Analisis Ketuntasan	
No.	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bjb	Jumlah bahan Bahan Logistik Kantor yang tersedia	3591 Bh.Paket/ Ktk/Unit/ rim	376.568.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bjb	Jumlah bahan Bahan Logistik Kantor yang tersedia	3591 Bh.Paket/ Ktk/Unit/ rim	414.225.000	
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bjb	Jumlah barang cetakan yang tersedia	4020 Bh.Paket/ Ktk/Unit/ rim	129.985.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bjb	Jumlah barang cetakan yang tersedia	4020 Bh.Paket/ Ktk/Unit/ rim	142.983.000	
12			Jumlah Pengandaan yang tersedia	1674 lbr				Jumlah Pengandaan yang tersedia	1674 lbr		
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bjb	Jumlah bahan bacaan atau buku peraturan perundang-undangan yang tersedia	24444 eks	109.998.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bjb	Jumlah bahan bacaan atau buku peraturan perundang-undangan yang tersedia	24444 eks	120.900.000	
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bjb	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	160 lap	297.100.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bjb	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	160 lap	1.184.400.000	
15	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bjb	Jumlah Dokumen Arsip Dinamis Pada SKPD	1 Tahun	38.000.000						
V	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bjb	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dapat digunakan	100 %	916.594.000	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bjb	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dapat digunakan	100 %	1.360.292.000	
15	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bjb	Jmh Kendaraan Dinas & Operasional atau lapangan yg dibeli	1 Unit	496.000.000	Pengadaan Dinas Kendaraan Dinas & Operasional atau lapangan	Bjb	Jmh Kendaraan Dinas & Operasional atau lapangan yg dibeli	1 Unit	496.000.000	
16	Pengadaan Mebel	Bjb	Jmh mebel yg dibeli	15 Bh/Paket/ Unit/set	106.405.000	Pengadaan Mebel	Bjb	Jmh mebel yg dibeli	15 Bh/Paket/ Unit/set	145.750.000	
17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bjb	Jmh peralatan dan mesin lainnya yg dibeli	35 Bh/Paket/ Unit/set	314.129.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bjb	Jmh peralatan dan mesin lainnya yg dibeli	35 Bh/Paket/ Unit/set	388.542.000	
18	Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bjb	Jmh pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terbangun	9 Bh/Paket/ Unit/set	-	Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bjb	Jmh pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terbangun	9 Bh/Paket/ Unit/set	330.000.000	

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan	
No.	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebijakan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bjb	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah yg difasilitasi	100 %	1.126.300.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bjb	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah yg difasilitasi	100 %	1.002.320.000	
VI											
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bjb	Jumlah Jasa Komunikasi, sumber daya air & listrik dan lainnya yang dapat digunakan	4 macam	454.520.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bjb	Jumlah Jasa Komunikasi, sumber daya air & listrik dan lainnya yang dapat digunakan	4 macam	454.520.000	
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bjb	Jmh pegawai administrasi non ASN aktif jasa pelayanan umum kantor lainnya	16 org	671.780.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bjb	Jmh pegawai administrasi non ASN aktif jasa pelayanan umum kantor lainnya	16 org	547.800.000	
VII											
21	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bjb	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100 %	2.083.914.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bjb	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100 %	1.518.240.000	
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bjb	Jmh kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas yg terfasilitasi pajak dan dipelihara	4 unit	505.000.000	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bjb	Jmh kendaraan dinas perorangan atau kendaraan jabatan dinas yg terfasilitasi pajak dan dipelihara	4 unit	370.260.000	

No.	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	35 unit	463.050.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	35 unit	434.950.000	12
22		Bjb					Bjb				
23	Pemeliharaan Mebel	Bjb	Jmh mebel yang dipelihara	861 unit/set/bh	30.600.000	Pemeliharaan Mebel	Bjb	Jmh mebel yang dipelihara	861 unit/set/bh	33.660.000	
24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bjb	Jmh pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	60 bh	250.675.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bjb	Jmh pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	60 bh	323.000.000	
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bjb	Jmh Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yg dipelihara	9 paket	834.589.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bjb	Jmh Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yg dipelihara	9 paket	456.370.000	
VIII	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Bjb	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan dan anggota DPRD yang difasilitasi	100 %	1.735.043.500	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Bjb	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan dan anggota DPRD yang difasilitasi	100 %	1.681.947.000	
26	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Bjb	Jmh publikasi dan dokumentasi tugas pimpinan dan anggota yang bekerjasama	3 Jenis	1.735.043.500	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Bjb	Jmh publikasi dan dokumentasi tugas pimpinan dan anggota yang bekerjasama	3 Jenis	1.681.947.000	
IX	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Bjb	Cakupan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD yg difasilitasi	100 %	395.100.000	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Bjb	Cakupan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD yg difasilitasi	100 %	19.196.200.000	
27	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Bjb	Jmh Pimpinan dan anggota DPRD yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu	30 org	-	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Bjb	Jmh Pimpinan dan anggota DPRD yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu	30 org	18.848.000.000	

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan		
No.	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan	
											Pending	
1	Penyediaan Pakaiannya Dinas dan Atribut DPRD	3	Jmh Pakaian dinas dan atribut DPRD yang tersedia	140 stel	290.100.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	8	Jmh Pakaian dinas dan atribut DPRD yang tersedia	140 stel	233.200.000	12	
28		Bjb					Bjb					
29	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Bjb	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah melaksanakan Medical Check Up	30 org	105.000.000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Bjb	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah melaksanakan Medical Check Up	30 org	115.000.000		
X	Layanan Administrasi DPRD	Bjb	Cakupan Layanan Administrasi Pimpinan DPRD yang difasilitasi	100 %	255.000.000	Layanan Administrasi DPRD	Bjb	Cakupan Layanan Administrasi Pimpinan DPRD yang difasilitasi	100 %	456.126.000		
30	Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD	Bjb	Jmh Kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD yang tersedia	12 bh	255.000.000	Penyediaan Kebutuhan rumah tangga DPRD	Bjb	Jmh Kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD yang tersedia	12 bh	456.126.000		
B	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Bjb	Tingkat Kepuasan Dukungan Pelayanan Pimpinan & Anggota DPRD	100 %	26.301.705.000	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Bjb	Tingkat Kepuasan Dukungan Pelayanan Pimpinan & Anggota DPRD	100 %	25.915.937.000		
XI	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Bjb	Persentase rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang tersusun	100 %	5.778.210.000	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Bjb	Persentase rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang tersusun	100 %	5.381.010.000		
31	Pembahasan rancangan Peraturan Daerah	Bjb	Jumlah Pembahasan rancangan dan paripurna penetapan Peraturan Daerah yang terfasilitasi	130 kali	5.163.680.000	Pembahasan rancangan Peraturan Daerah	Bjb	Jumlah Pembahasan rancangan dan paripurna penetapan Peraturan Daerah yang terfasilitasi	130 kali	4.766.480.000		
32	Facilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Bjb	Jmh penyusunan Naskah Akademik yang terfasilitasi	3 naskah	614.530.000	Facilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Bjb	Jmh penyusunan Naskah Akademik yang terfasilitasi	3 naskah	614.530.000		
XII	Peningkatan Kapasitas DPRD	Bjb	Persentase Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang terfasilitasi	100 %	4.630.902.000	Peningkatan Kapasitas DPRD	Bjb	Persentase Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang terfasilitasi	100 %	4.777.302.000		

No.	Rancangan Awal EKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan 2	Lokasi 3	Indikator Kinerja 4	Target Capaian 5	Pagu Indikatorf (Rp) 6	Program dan Kegiatan 7	Lokasi 8	Indikator Kinerja 9	Target Capaian 10	Kebutuhan Dana (Rp) 11	
1	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	3	Jumlah dialog/hearing dan dengar pendapat yang terfasilitasi	5 24 Kali	114.620.000	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	8	Jumlah dialog/hearing dan dengar pendapat yang terfasilitasi	10 24 Kali	11 126.000.000	12
42		Bjb	Jumlah dialog/hearing dan dengar pendapat yang terfasilitasi	100 %	38.627.495.088		Bjb	Jumlah dialog/hearing dan dengar pendapat yang terfasilitasi	100 %	58.727.310.000	

2.5 Penelaahan Usulan Pemangku Kepentingan

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Walikota Kota Banjarbaru dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama untuk program ke depan. Adapun rencana program dimaksud yang sesuai dalam RKPD mendukung kebijakan “ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik “ adalah program untuk semua SKPD dan mendukung tugas, wewenang dan fungsi dewan. Sekretariat DPRD tidak ada program yang muncul dari usulan masyarakat.

Program yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru tersebut adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Pada bagian ini akan kami sajikan rekapitulasi usulan program dan kegiatan pada tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kota Banjarbaru

Kode	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
4.02.01	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Bjb	predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	12.325.790.088	
		Bjb	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi		
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Bjb	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD	46.030.000	
		Bjb	Persentase Perencanaan Penganggaran yang responsif gender		
4.02.01.2.01.01	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bjb	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SKPD yg tersusun sesuai ketentuan	11.000.000	
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Bjb	Jmh Dok.DPA-SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	23.730.000	
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Bjb	Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	11.300.000	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bjb	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	4.109.604.418	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bjb	Jmh ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu.	4.036.237.918	
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bjb	Jmh Lap keuangan SKPD yang disusun di akhir tahun sesuai ketentuan.	60.680.000	
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Bjb	Jmh Lap keuangan SKPD yang disusun secara berkala sesuai ketentuan.	12.686.500	
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bjb	Persentase ASN yang mengimplementasikan hasil bimtek dan diklatnya	483.650.000	
4.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Bjb	Jmh pakaiat batik/sastrangan yang tersedia	25.450.000	
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya	Bjb	Jmh pakaian dinas Pamdai dan ASN beserta atribut kelengkapannya yg tersedia	8.100.000	
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bjb	Jmh ASN yang telah mengikuti Bimtek	450.100.000	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bjb	Cakupan Layanan Administrasi Umum yang difasilitasi	1.174.614.170	
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bjb	Jmh Peralatan dan Perlengkapan Kantor yg tersedia	222.963.170	
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bjb	Jumlah bahan Bahan Logistik Kantor yang tersedia	376.568.000	
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bjb	Jumlah barang cetakan yang tersedia	129.985.000	
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bjb	Jumlah bahan bacaan atau buku peraturan perundang-undangan yang tersedia	109.998.000	
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bjb	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	297.100.000	
4.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bjb	Jumlah Dokumen Arsip Dinamis Pada SKPD	38.000.000	
4.02.01.2.07	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bjb	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	916.534.000	
4.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bjb	Jmh Kendaraan Dinas & Operasional atau lapangan yg dibeli	496.000.000	
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Bjb	Jmh mebel yg dibeli	106.405.000	
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bjb	Jmh peralatan dan mesin lainnya yg dibeli	314.129.000	
4.02.01.2.07.11	Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bjb	Jmh pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terbangun	-	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bjb	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah yg difasilitasi	1.126.300.000	
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bjb	Jumlah Jasa Komunikasi,sumber daya air & listrik dan lainnya yang dapat digunakan	454.520.000	
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bjb	Jmh pegawai administrasi non ASN aktif	671.780.000	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bjb	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	2.083.914.000	
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bjb	Jmh kendaraan dinas perorangan atau kendaraan jabatan dinas yg terfasilitasi pajak dan dipelihara	505.000.000	
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bjb	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	463.050.000	

Kode	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Bjb	Jmh mebel yang dipelihara	30.600.000	
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bjb	Jmh pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	250.675.000	
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bjb	Jmh Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yg dipelihara	834.589.000	
4.02.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Bjb	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan dan anggota DPRD yang difasilitasi	1.735.043.500	
4.02.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Bjb	Jmh publikasi dan dokumentasi tugas pimpinan dan anggota yang bekerjasama	1.735.043.500	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Bjb	Cakupan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD yg difasilitasi	395.100.000	
4.02.01.2.15.01	Penyenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Bjb	Jmh Pimpinan dan anggota DPRD yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu	290.100.000	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaiin Dinas dan Atribut DPRD	Bjb	Jmh Pakaiin dinas dan atribut DPRD yang tersedia	105.000.000	
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Bjb	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah melaksanakan Medical Check UP	255.000.000	
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Bjb	Cakupan Layanan Administrasi Pimpinan DPRD yang difasilitasi	255.000.000	
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan rumah tangga DPRD	Bjb	Jmh Kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD yang tersedia	26.301.705.000	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Bjb	Tingkat Kepuasan Dukungan Pelayanan Pimpinan & Anggota DPRD		
4.02.02.2.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Bjb	Persentase rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang tersusun	5.778.210.000	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan rancangan Peraturan Daerah	Bjb	Jumlah Pembahasan rancangan dan paripurna penetapan Peraturan Daerah yang terfasilitasi	5.163.680.000	
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/keterangan dan/atau Naskah Akademik	Bjb	Jmh penyusunan Naskah Akademik yang terfasilitasi	614.530.000	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Bjb	Persentase Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang terfasilitasi	4.630.902.000	
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Bjb	Jumlah pimpinan dan anggota DPRD yang mengikuti bimtek	3.651.842.000	
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Bjb	Jmh kelompok pakar & Tim ahli yang tersedia	363.000.000	
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Bjb	Jmh tenaga ahli fraksi yang tersedia	277.200.000	
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Bjb	Jmh dok program kerja DPRD yang tersusun	338.860.000	
4.02.03.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi masyarakat	Bjb	Persentase Penyerapan & penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang terfasilitasi	3.068.713.000	
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja Dalam daerah	Bjb	Jumlah Koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah dan lapangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang terlaksana	348.713.000	
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Bjb	Jumlah Dok Pokir yang tersusun	20.000.000	
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Bjb	Jumlah Kegiatan Reses yang dilaksanakan	2.700.000.000	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Bjb	Persentase Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD yang terfasilitasi	12.823.878.000	
4.02.02.2.08.01	Koor dinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Bjb	Jmh Koor dinasi dan Konsultasi luar daerah yang terlaksana	12.709.258.000	
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Bjb	Jumlah dialog/hearing dan dengar pendapat yang terfasilitasi	114.620.000	
				38.527.495.088	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang akan mempengaruhi pencapaian target Pembangunan dalam RPJPN, dimana Pendapatan Perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan Negara-negara berpenghasilan menengah atas yang memiliki kondisi infrastruktur , kualitas sumber daya , layanan publik serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri , maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang yang terkait dengan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran.

Hubungan Tujuan dan Sasaran dapat dilihat sebagaimana Tabel berikut :

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan kualitas Fasilitasi dalam pelaksanaan tugas , fungsi dan wewenang DPRD Kota Banjarbaru	Meningkatnya kualitas Fasilitasi dalam pelaksanaan tugas , fungsi dan wewenang DPRD Kota Banjarbaru

3.3 Program dan Kegiatan

Seluruh jajaran satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintahan Kota Banjarbaru wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien , efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk tercapainya sasaran program-program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pelaksanaan kegiatan, baik antar kegiatan satu program maupun kegiatan antar program dalam satu Instansi dan antar Instansi mensyaratkan pentingnya sinergitas dan sinkronisasi antar SKPD dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing SKPD tersebut.

Startegi dan arah kebijakan yang ditetapkan merupakan rumusan perencanaan komprahensif tentang bagaimana Sekretariat DPRD melakukan upaya untuk mencapai visi ,misi tujuan dan sasaran target kinerja yang dibebankan dalam RPJMD Kota Banjarbaru 2021-2026 serta efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD selanjutnya dituangkan secara lebih rinci sesuai dengan sasaran yang dicapai yaitu sebagai berikut :

Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah

Sasaran	Strategi	Kebijakan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memamfaatkan pengguna teknologi Innformasi dan Kompentensi ASN 2. Melaksanakan SOP Pelayanan 3. Meningkatkan sara prasarana pelayanan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kompetensi ASN mslalui bintek formal dan infomal 2. Penguatan penerapan prosedur kerja secara sistematis pada tiap-tiap pekerjaan/pelayanan 3. Penyediaan sarana dan prasarana informasi secara digital

Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

1. Program Terpilih

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru sesuai urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

2. Kegiatan sesuai tugas dan fungsi

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarahannya sumber daya (SDM), barang modal termasuk teknologi, dana sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD baik yang dilaksanakan untuk semua SKPD maupun dalam rangka memfasilitasi kegiatan dewan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

- **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah**
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan / Semesteran SKPD
- **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Mebel
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- **Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**
 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan
- **Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**
 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
- **Layanan Administrasi DPRD**
 - Penyediaan Kebutuhan rumah tangga DPRD
- 2. **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**
 - **Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**
 - Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik
 - Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik
 - **Peningkatan Kapasitas DPRD**
 - Pendalaman Tugas DPRD

- Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
- Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
- Penyusunan Program Kerja DPRD

- **Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi masyarakat**
 - Kunjungan Kerja Dalam daerah
 - Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
 - Pelaksanaan Reses
- **Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD**
 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
 - Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Penyajian pada sub bab ini dapat melampirkan tabel 5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD tahun 2022 dan Perkiraan Maju tahun 2023 Kota Banjarbaru sebagai berikut :

Tabel 5
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kota Banjarbaru

Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru		Rencana Tahun 2022			Prakiraan Rencana Maju Tahun 2023				
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02.01	Peningkatkan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	Bjb	BB	12.325.790.088			BB	35.436.590.000
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD	Bjb	WTP	46.030.000			100 %	49.710.000
4.02.01.2.01.01	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Penganggaran yang resonan/mandiri	Bjb	2 Dok	11.000.000			2 Dok	11.880.000
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SKPD yg tersusun sesuai ketentuan	Bjb	11 Dok	23.730.000			11 Dok	25.630.000
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	Bjb	3 Dok	11.300.000			3 Dok	12.200.000
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	Bjb	100 %	4.109.604.418			100 %	4.655.000.000
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jmh ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu.	Bjb	33 org	4.036.237.918			33 org	4.570.700.000
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jmh Lap keuangan SKPD yang disusun di akhir tahun sesuai ketentuan.	Bjb	1 Dok	60.680.000			1 Dok	69.230.000
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD	Jmh Lap Keuangan SKPD yang disusun secara berkala sesuai ketentuan.	Bjb	3 Dok	12.686.500			3 Dok	15.070.000
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mengimplementasikan hasil bimtek dan diklatnya	Bjb	100 %	483.650.000			100 %	925.440.000
4.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jmh pakaian batik/sasirangan yang tersedia	Bjb	100 Stel	25.450.000			100 Stel	44.000.000
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya	Jmh pakaian dinas Pamdal dan ASN beserta atribut kelengkapannya yg tersedia	Bjb	30 Stel	8.100.000			30 Stel	43.740.000
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jmh ASN yang telah mengikuti Bimtek	Bjb	54 org	450.100.000			54 org	837.700.000
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum yang difasilitasi	Bjb	100 %	1.174.614.170			100 %	3.002.210.000
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jmh Peralatan dan Perlengkapan Kantor yg tersedia	Bjb	2427 Bh.Paket/Ktk /Unit	222.963.170			2427 Bh.Paket/Kt k/Unit	455.000.000
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan Bahan Logistik kantor yang tersedia	Bjb	3591 Bh.Paket/Ktk /Unit/rim	376.568.000			3600 Bh.Paket/Kt k/Unit/rim	447.360.000
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	Bjb	4020 Bh.Paket/Ktk /Unit/rim	129.985.000			4050 Bh.Paket/Kt k/Unit/rim	154.420.000

Lembar 1 dari 3

Praktoran Rencana Maju Tahun 2023									
Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan atau buku peraturan perundang-undangan yang tersedia	Bjb	24444 eks	109.998.000			24444 eks	1.30.600.000
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	Bjb	160 lap	297.100.000			170 lap	1.814.830.000
4.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Arsip Dinamis Pada SKPD	Bjb	1 Tahun	38.000.000			100 %	933.410.000
4.02.01.2.07	Pengadaan BMD Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang Usuran Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	Bjb	100 %	916.534.000			100 %	
4.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jmh Kendaraan Dinas & Operasional atau lapangan yg dibeli	Bjb	1 unit	496.000.000				
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jmh mebel yg dibeli	Bjb	15 Bh/Paket/Unit/set	106.405.000			17 Bh/Paket/Unit/set	157.410.000
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jmh peralatan dan mesin lainnya yg dibeli	Bjb	35 Bh/Paket/Unit/set	314.129.000			34 Bh/Paket/Unit/set	419.600.000
4.02.01.2.07.11	Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jmh pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terbangun	Bjb	9 Bh/Paket/Unit/set	-			9 Bh/Paket/Unit/set	356.400.000
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang usuran pemerintahan daerah pada perangkat daerah yg difasilitasi	Bjb	100 %	1.126.300.000			100 %	1.082.580.000
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, sumber daya air & listrik dan lainnya yang dapat digunakan	Bjb	4 macam	454.520.000			4 macam	490.380.000
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jmh pegawai administrasi non ASN aktif	Bjb	16 org	671.780.000			16 org	591.700.000
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Bjb	100 %	2.083.914.000			100 %	1.747.500.000
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jmh kendaraan dinas perorangan atau kendaraan jabatan dinas yg terfasilitasi pajak dan dipelihara	Bjb	4 unit	505.000.000			4 unit	399.800.000
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	Bjb	35 unit	463.050.000			35 unit	469.700.000
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jmh mebel yang dipelihara	Bjb	861 unit/set/bh	30.600.000			865 unit/set/bh	36.100.000
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jmh pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Bjb	60 bh	250.675.000			65 bh	348.900.000
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jmh Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yg dipelihara	Bjb	9 paket	834.589.000			9 paket	492.800.000
4.02.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan dan anggota DPRD yang difasilitasi	Bjb	100 %	1.735.043.500			100 %	1.816.500.000
4.02.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jmh publikasi dan dokumentasi tugas pimpinan dan anggota yang bekerjasama	Bjb	3 Jenis	1.735.043.500			3 jenis	1.816.500.000

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022			Praktik Berencana Maju Tahun 2023		
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	10
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Cakupan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	Bjb	100 %	395.100.000		100 %	20.731.640.000
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jmh. Pimpinan dan anggota DPRD yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu	Bjb	30 org			30 org	20.355.000.000
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakailan Dinas dan Atribut DPRD	Jmh Pakailan dinas dan atribut DPRD yang tersedia	Bjb	140 stel	290.100.000		140 stel	251.900.000
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah melaksanakan Medical Check UP	Bjb	30 org	105.000.000		30 org	124.740.000
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Cakupan Layanan Administrasi Pimpinan DPRD yang difasilitasi	Bjb	100 %	255.000.000		100 %	492.600.000
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan rumah tangga DPRD	Jmh Kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD yang tersedia	Bjb	12 bin	255.000.000		12 bin	492.600.000
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tingkat Kepuasan Dukungan Pelayanan Pimpinan & Anggota DPRD	Bjb	100 %	26.301.705.000		100 %	27.988.620.000
4.02.02.2.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang tersusun	Bjb	100 %	5.778.210.000		100 %	5.811.400.000
4.02.02.2.01.02	Pembahasan rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Pembahasan rancangan dan paripurna penetapan Peraturan Daerah yang terfasilitasi	Bjb	130 kali	5.163.680.000		130 kali	5.147.700.000
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jmh penyusunan Naskah Akademik yang terfasilitasi	Bjb	3 naskah	614.530.000		3 naskah	663.700.000
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang terfasilitasi	Bjb	100 %	4.630.902.000		100 %	5.159.200.000
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah pimpinan dan anggota DPRD yang mengikuti bimtek	Bjb	186 O/k	3.651.842.000		196 O/k	4.105.900.000
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jmh kelompok pakar & Tim ahli yang tersedia	Bjb	3 org	363.000.000		3 org	392.000.000
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jmh tenaga ahli fraksi yang tersedia	Bjb	7 org	277.200.000		7 org	299.300.000
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jmh dok program kerja DPRD yang tersusun	Bjb	12 Dok	338.860.000		12 Dok	362.000.000
4.02.03.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi masyarakat	Persentase Penyerapan & Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang terfasilitasi	Bjb	100 %	3.068.715.000		100 %	3.019.020.000
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja Dalam daerah	Jumlah Koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah dan lapangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang terlaksana	Bjb	1 Tahun	348.715.000		1 Tahun	285.960.000
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dok Pokir yang tersusun	Bjb	3 Dok	20.000.000		3 Dok	23.760.000
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah kegiatan Reses yang dilaksanakan	Bjb	3 Kali	2.700.000.000		3 Kali	2.709.300.000
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD yang terfasilitasi	Bjb	100 %	12.823.878.000		100 %	13.999.000.000
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jmh Koordinasi dan Konsultasi luar daerah yang terlaksana	Bjb	1 Tahun	12.709.258.000		1 Tahun	13.863.000.000
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah dialog/hearing dan dengar pendapat yang terfasilitasi	Bjb	24 Kali	114.620.000		24 Kali	136.000.000
			Bjb	100 %	38.627.495.088		100 %	63.425.210.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tercantum dalam RKPD Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru Tahun 2022, maka disusun rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai berikut :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2022	
1	2	3	4	
4.02.01	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	BB	32,811,373,000
		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	WTP	
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD	100 %	46,030,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2022	
1	2	3	4	
4.02.01.2.01.01	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SKPD yg tersusun sesuai ketentuan	2 Dok	11,000,000
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jmh Dok.DPA-SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	11 Dok	23,730,000
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	3 Dok	11,300,000
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100 %	4.109.604.418
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jmh ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu.	33 org	4.036.237.918
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jmh Lap keuangan SKPD yang disusun di akhir tahun sesuai ketentuan.	1 Dok	60.680.000
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/s emesteran SKPD	jmh Lap Keuangan SKPD yang disusun secara berkala sesuai ketentuan.	3 Dok	12.686.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2022	
1	2	3	4	
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mengimplementasi- kan hasil bimtek dan diklatnya	100 %	483.650.000
4.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jmh pakaian batik/sasirangan yang tersedia	100 Stel	25.450.000
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya	Jmh pakaian dinas Pamdal dan ASN beserta atribut kelengkapannya yg tersedia	30 Stel	8.100.000
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	jmh ASN yang telah mengikuti Bimtek	54 Org	450.100.000
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum yang difasilitasi	100 %	1.174.614.170
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jmh Peralatan dan Perlengkapan Kantor yg tersedia	2427 Bh.Pak et/Ktk/ Unit	222.963.170
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan Bahan Logistik Kantor yang tersedia	3591 Bh.Pak et/Ktk/ Unit/ri m	376.568.000
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	4020 Bh.Pak et/Ktk/ Unit/ri m	129.985.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2022	
1	2	3	4	
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan atau buku peraturan perundang-undangan yang tersedia	24444 Eks	109.998.000
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	160 Lap	297.100.000
4.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Arsip Dinamis Pada SKPD	1 Tahun	38.000.000
4.02.01.2.07	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerinah Daerah yang dapat digunakan	100 %	916.534.000
4.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jmh Kendaraan Dinas & Operasional atau lapangan yg dibeli	1 Unit	496.000.000
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	jmh mebel yg dibeli	15 Bh/Paket/Unit/set	106.405.000
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jmh peralatan dan mesin lainnya yg dibeli	35 Bh/Paket/Unit/set	314.129.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2022	
1	2	3	4	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah yg difasilitasi	100 %	1.126.300.000
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, sumber daya air & listrik dan lainnya yang dapat digunakan	4 macam	454.520.000
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jmh pegawai administrasi non ASN aktif	16 Org	671.780.000
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100 %	2.083.914.000
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jmh kendaraan dinas perorangan atau kendaraan jabatan dinas yg terfasilitasi pajak dan dipelihara	4 unit	505.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2022	
1	2	3	4	
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	35 unit	463.050.000
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	jmh mebel yang dipelihara	861 unit/set/bh	30.600.000
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jmh pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	60 Bh	250.675.000
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jmh Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yg dipelihara	9 paket	834.589.000
4.02.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan dan anggota DPRD yang difasilitasi	100 %	1.735.043.500
4.02.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jmh publikasi dan dokumentasi tugas pimpinan dan anggota yang bekerjasama	3 Jenis	1.735.043.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2022	
1	2	3	4	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Cakupan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD yg difasilitasi	100 %	395.100.000
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jmh Pakaian dinas dan atribut DPRD yang tersedia	140 stel	290.100.000
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah melaksanakan Medical Check UP	30 Org	105.000.000
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Cakupan Layanan Administrasi Pimpinan DPRD yang difasilitasi	100 %	255.000.000
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan rumah tangga DPRD	jmh Kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD yang tersedia	12 Bln	255.000.000
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tingkat Kepuasan Dukungan Pelayanan Pimpinan & Anggota DPRD	100 %	26.301.705.000
4.02.02.2.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang tersusun	100 %	5.778.210.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2022	
1	2	3	4	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Pembahasan rancangan dan paripurna penetapan Peraturan Daerah yang terfasilitasi	130 Kali	5.163.680.000
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keteran gan dan/atau Naskah Akademik	jmh penyusunan Naskah Akademik yang terfasilitasi	3 naskah	614.530.000
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang terfasilitasi	100 %	4.630.902.000
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	jumlah pimpinan dan anggota DPRD yang mengikuti bimtek	186 O/k	3.651.842.000
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jmh kelompok pakar & Tim ahli yang tersedia	3 Org	363.000.000
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	jmh tenaga ahli fraksi yang tersedia	7 Org	277.200.000
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jmh dok program kerja DPRD yang tersusun	12 Dok	338.860.000
4.02.03.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi masyarakat	Pesentase Penyerapan & Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang terfasilitasi	100 %	3.068.715.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2022	
1	2	3	4	
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja Dalam daerah	Jumlah Koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah dan lapangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang terlaksana	1 Tahun	348.715.000
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dok Pokir yang tersusun	3 Dok	20.000.000
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Kegiatan Reses yang dilaksanakan	3 Kali	2.700.000.000
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD yang terfasilitasi	100 %	12.823.878.000
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	jumlah Koordinasi dan Konsultasi luar daerah yang terlaksana	1 Tahun	12.709.258.000
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah dialog/hearing dan dengar pendapat yang terfasilitasi	24 Kali	114.620.000
			100 %	38.627.495.088

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru yang didalamnya mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang disusun ini agar dapat dipakai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi serta wewenang DPRD.

Adanya Renja ini diharapkan agar Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru serta seluruh aparatnya dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan kebutuhan baik bersifat administratif dan operasional DPRD serta pelayanan yang bersifat cepat, akuntable, tepat berdasarkan data yang akurat.

Banjarbaru, 8 Maret 2021

SEKRETARIS DPRD KOTA BANJARBARU



H. AIDA YUNANI, S.Sos, MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 19650929 198603 1 019

LAMPIRAN



WALI KOTA BANJARBARU

Alamat : Jl. P. Batur No.1 Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Telp/Fax (0511 772450)

Banjarbaru, 01 Maret 2021

Kepada Yth.

Yth. **Kepala SKPD Lingkup
Pemerintah Kota Banjarbaru**
di -
Banjarbaru

SURAT EDARAN

Nomor : 050/0175 -Sunram&Eva/BAPPEDA

Tentang

PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD KOTA BANJARBARU TAHUN 2022

Seiring proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru Tahun 2022, dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 dan hasil evaluasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun lalu.

Berkenaan dengan hal tersebut, seluruh Perangkat Daerah agar menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) tahun 2022. Rancangan Awal Renja tersebut disampaikan kepada Bappeda **paling lambat tanggal 8 Maret 2021**, untuk dilakukan verifikasi. Selanjutnya dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah agar berkoordinasi dengan Bidang Penyusunan Program dan Evaluasi Bappeda Kota Banjarbaru.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.



Lampiran I :

Mengingat masa RPJMD Kota Banjarbaru berakhir di tahun 2021, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ Tahun 2021 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pasca pemilukada serentak tahun 2020, bahwa penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada **arah kebijakan RPJPD** dan mempertimbangkan **visi dan misi kepala daerah terpilih** serta memperhatikan RKP Tahun 2022.

Tabel 1.
Agenda Penyusunan RKPD dan Renja SKPD

NO.	KEGIATAN	WAKTU
1.	Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Nopember-Desembar
2.	Penyusunan Rancangan Awal RKPD	Minggu I Januari
3.	Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD/Input Rancangan Awal Renja SKPD	Minggu I Januari
4.	Penyampaian Pokok-pokok pikiran DPRD	Minggu I Pebruari
5.	Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD	Minggu II Pebruari
6.	Penyempurnaan Rancangan Awal RKPD hasil Forum Konsultasi Publik menjadi Rancangan RKPD	Minggu II Pebruari
7.	Penyampaian Surat Edaran Kepala Daerah kepada SKPD tentang Rancangan RKPD	Minggu I Maret
8.	Penyempurnaan Rancangan Awal Renja SKPD berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah kepada SKPD tentang Rancangan RKPD	Minggu II Maret
9.	Forum SKPD/Forum Gabungan SKPD	Minggu III Maret
10.	Penyempurnaan Rancangan RKPD hasil Forum SKPD/Forum Gabungan SKPD	Minggu IV Maret
11.	Musrenbang Tingkat Kota	Minggu I April
12.	Penyempurnaan Rancangan RKPD hasil Musrenbang Tingkat Kota menjadi Rancangan Akhir RKPD	Minggu II Mei
13.	Penyampaian Rancangan Akhir RKPD kepada Provinsi untuk dilakukan fasilitasi	Minggu III Mei
14.	Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD hasil Fasilitasi Provinsi	Minggu IV Mei
15.	Penetapan Rancangan Akhir RKPD dengan Peraturan Walikota	Minggu I Juni
16.	Penyempurnaan Rancangan Renja SKPD menjadi Rancangan Akhir Renja SKPD	Minggu II Juni
17.	Penetapan Rancangan Akhir Renja SKPD dengan Keputusan Kepala SKPD	Minggu I Juli

Tabel 2.

Misi, Sasaran, Indikator, Target dan Arah Kebijakan RPJPD Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 tahap IV (Tahun 2021-2025)

Misi	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan
Mewujudkan masyarakat/SDM yang berkualitas	Terwujudnya masyarakat/SDM yang berkualitas	1. Angka Partisipasi Murni : - SD - SMP - SMA 2. Angka Melek Huruf 3. Usia Harapan Hidup	98,8 % 81 % 70 % 100 % 78 tahun	Peningkatan daya saing daerah untuk mewujudkan Banjarbaru sebagai daerah terdepan di Kalimantan Selatan, terutama di bidang Pendidikan, perdagangan, industri pengolahan dan jasa, pemerintahan dan permukiman.
Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan berbasis potensi daerah	Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan Meningkatnya daya beli masyarakat Penyerapan angkatan kerja Pemerataan Pendapatan	1. Pertumbuhan PDRB 2. PDRB per Kapita 3. Pengangguran Terbuka 4. Penduduk miskin	6,93 % 33,4 juta 7 - 6 % 3 - 2 %	Peningkatan daya saing daerah untuk mewujudkan Banjarbaru sebagai daerah terdepan di Kalimantan Selatan, terutama di bidang Pendidikan, perdagangan, industri pengolahan dan jasa, pemerintahan dan permukiman.
Mewujudkan pengembangan wilayah dan lingkungan hidup yang asri dan lestari serta menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang	Terwujudnya lingkungan pemukiman yang sehat, aksesable dan berwawasan lingkungan	1. Cakupan pelayanan air Bersih 2. Pengelolaan Persampahan 3. Fasilitas Umum 4. Ruang Terbuka Hijau	90 % 90 % 90 % 20 %	Peningkatan daya saing daerah untuk mewujudkan Banjarbaru sebagai daerah terdepan di Kalimantan Selatan, terutama di bidang Pendidikan, perdagangan, industri pengolahan dan jasa, pemerintahan dan permukiman.
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntable dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat	1. Tingkat Pelayanan Publik 2. Pemenuhan kuantitas perkantoran	sangat baik 100 %	Peningkatan daya saing daerah untuk mewujudkan Banjarbaru sebagai daerah terdepan di Kalimantan Selatan, terutama di bidang Pendidikan, perdagangan, industri pengolahan dan jasa, pemerintahan dan permukiman

Tabel 2.

Visi dan Misi Kepala Daerah Tahun 2021-2026

VISI	MISI	INDIKATOR
BANJARBARU MAJU, AGAMIS, DAN SEJAHTERA (BANJARBARU JUARA)	Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
	Meningkatkan pembangunan perekonomian daerah yang berkelanjutan dengan kearifan lokal dan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah	Reformasi Birokrasi (RB)

Sistematika Rencana Kerja SKPD :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Pemangku Kepentingan

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Matriks Cascading Kinerja Tahun 2021

Matrik Cascading Kinerja Tahun 2022

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SKPD YANG BERTANGGUNG/ AWAB	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN SUB KEGIATAN
		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Peningkatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, dan penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SKPD yg tersusun sesuai ketentuan
			Meningkatnya Pelayanan internal perangkat daerah	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi			Persentase Perencanaan penganggaran yang responsif gender			
								Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya penyusunan DPA SKPD	Jmh Dok DPA-SKPD yang tersusun sesuai ketentuan
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan SKPD	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Jmh ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu.
								Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan tahunan	Jmh Lap Keuangan SKPD yang disusun di akhir tahun sesuai ketentuan.
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semestaran SKPD	Terlaksananya monitoring capaian kinerja keuangan SKPD	Jmh Lap Keuangan SKPD yang disusun secara berkala sesuai ketentuan.

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SKPD YANG BERTANGGUNG/ AWAB	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan kompetensi ASN SKPD	Persentase ASN yang mengimplementasikan hasil bimtek dan diklatnya	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Teraksananya persiapan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Teraksananya persiapan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah pakaian batik/sasragan yang tersedia
								Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya	Teraksananya pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya	Teraksananya pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas Pamdal dan ASN beserta atribut Kelengkapannya yang tersedia
								Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undaanan	Teraksananya peningkatan kompetensi melalui bimtek	Teraksananya peningkatan kompetensi melalui bimtek	Jumlah ASN yang telah mengikuti Bimtek
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan pengelolaan administrasi Umum SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Umum yang difasilitasi	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Teraksananya pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Teraksananya pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan Nkr yang tersedia
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Teraksananya pengadaan Bahan Logistik Kantor	Teraksananya pengadaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan Bahan Logistik Kantor yang tersedia
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Teraksananya pengadaan barang cetakan	Teraksananya pengadaan barang cetakan	Jumlah barang cetakan yang tersedia
									Teraksananya pengadaan barang	Teraksananya pengadaan barang	Jumlah Pengadaan barang tersedia
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Teraksananya pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Teraksananya pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan atau buku peraturan perundang-undangan yang tersedia
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Teraksananya penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Teraksananya penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SKPD YANG BERTANGGUNG/ AWAB	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN SUB KEGIATAN	
								Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Teraksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Arsip Dinamis Pada SKPD
					Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan penyediaan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dapat digunakan	Pengadaan Kendaraan Dinas & Operasional atau lapangan	Teraksananya Pengadaan Kendaraan Dinas & Operasional atau lapangan	jmh Kendaraan Dinas & Operasional atau lapangan yg dibeli
								Pengadaan Mebel	Teraksananya pengadaan mebel	jmh mebel yang dibeli
								Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Teraksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jmh peralatan dan mesin lainnya yang dibeli
								Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Teraksananya Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	jmh pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan fasilitas penggunaan jasa pihak ketiga	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yg difasilitasi	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Teraksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, sum ber daya air & listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, sum ber daya air & listrik dan lainnya yang dapat digunakan
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Teraksananya penyediaan pegawai administrasi kantor non ASN dan jasa pelayanan umum kantor lainnya	jmh pegawai administrasi non ASN aktif
										jasa pelayanan umum kantor lainnya

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	KEGIATAN	SASARAN SUB-KEGIATAN
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan penggunaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
						Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang terfasilitasi pajak dan dipelihara
						Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terfasilitasi pajak dan dipelihara
						Terlaksananya pemeliharaan mebel
						Jmh mebel yang dipelihara
						Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
						Jmh peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara
						Terlaksananya Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
						Jmh Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
						Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan
						Jumlah Media Publikasi dan dokumentasi pimpinan dan anggota DPRD yang bekerjasama
						Terlaksananya Kerjasama publikasi dan dokumentasi pimpinan dan anggota DPRD
						Jumlah Media Publikasi dan dokumentasi pimpinan dan anggota DPRD yang bekerjasama
						Terlaksananya Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan dan Anggota DPRD yang difasilitasi
						Peningkatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan dan Anggota DPRD
						Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Tabel 6.1.

**Program Pembangunan Prioritas Daerah yang disertai
Pagu Indikatif Tahun 2021 s.d Tahun 2026
Kota Banjarbaru**

No.	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator (Kuantitatif)	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
14		Terlaksananya peningkatan dan	4.02.01.2.06.09	Peningkatan hasil belajar siswa yang dapat diukur	1,2 bsk	1.800.000.000	1.710.000.000	1.620.000.000	1.530.000.000	1.440.000.000	1.350.000.000	1.260.000.000	1.170.000.000	1.080.000.000	990.000.000	900.000.000
V	Investigasi Pengukuran Berbasis Penemuan Kembali Pemertanian Daerah	Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa	4.02.01.2.06.10	Peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa yang dapat diukur	1,2 bsk	1.800.000.000	1.710.000.000	1.620.000.000	1.530.000.000	1.440.000.000	1.350.000.000	1.260.000.000	1.170.000.000	1.080.000.000	990.000.000	900.000.000
15		Terlaksananya peningkatan dan	4.02.01.2.07.05	Peningkatan hasil belajar siswa yang dapat diukur	1,2 bsk	1.800.000.000	1.710.000.000	1.620.000.000	1.530.000.000	1.440.000.000	1.350.000.000	1.260.000.000	1.170.000.000	1.080.000.000	990.000.000	900.000.000
16		Terlaksananya peningkatan dan	4.02.01.2.07.06	Peningkatan hasil belajar siswa yang dapat diukur	1,2 bsk	1.800.000.000	1.710.000.000	1.620.000.000	1.530.000.000	1.440.000.000	1.350.000.000	1.260.000.000	1.170.000.000	1.080.000.000	990.000.000	900.000.000
17		Terlaksananya peningkatan dan	4.02.01.2.07.11	Peningkatan hasil belajar siswa yang dapat diukur	1,2 bsk	1.800.000.000	1.710.000.000	1.620.000.000	1.530.000.000	1.440.000.000	1.350.000.000	1.260.000.000	1.170.000.000	1.080.000.000	990.000.000	900.000.000
18		Terlaksananya peningkatan dan	4.02.01.2.08	Peningkatan hasil belajar siswa yang dapat diukur	1,2 bsk	1.800.000.000	1.710.000.000	1.620.000.000	1.530.000.000	1.440.000.000	1.350.000.000	1.260.000.000	1.170.000.000	1.080.000.000	990.000.000	900.000.000
19		Terlaksananya peningkatan dan	4.02.01.2.08.02	Peningkatan hasil belajar siswa yang dapat diukur	1,2 bsk	1.800.000.000	1.710.000.000	1.620.000.000	1.530.000.000	1.440.000.000	1.350.000.000	1.260.000.000	1.170.000.000	1.080.000.000	990.000.000	900.000.000
20		Terlaksananya peningkatan dan	4.02.01.2.08.04	Peningkatan hasil belajar siswa yang dapat diukur	1,2 bsk	1.800.000.000	1.710.000.000	1.620.000.000	1.530.000.000	1.440.000.000	1.350.000.000	1.260.000.000	1.170.000.000	1.080.000.000	990.000.000	900.000.000
21		Terlaksananya peningkatan dan	4.02.01.2.09	Peningkatan hasil belajar siswa yang dapat diukur	1,2 bsk	1.800.000.000	1.710.000.000	1.620.000.000	1.530.000.000	1.440.000.000	1.350.000.000	1.260.000.000	1.170.000.000	1.080.000.000	990.000.000	900.000.000
22		Terlaksananya peningkatan dan	4.02.01.2.09.01	Peningkatan hasil belajar siswa yang dapat diukur	1,2 bsk	1.800.000.000	1.710.000.000	1.620.000.000	1.530.000.000	1.440.000.000	1.350.000.000	1.260.000.000	1.170.000.000	1.080.000.000	990.000.000	900.000.000
23		Terlaksananya peningkatan dan	4.02.01.2.09.02	Peningkatan hasil belajar siswa yang dapat diukur	1,2 bsk	1.800.000.000	1.710.000.000	1.620.000.000	1.530.000.000	1.440.000.000	1.350.000.000	1.260.000.000	1.170.000.000	1.080.000.000	990.000.000	900.000.000
24		Terlaksananya peningkatan dan	4.02.01.2.09.05	Peningkatan hasil belajar siswa yang dapat diukur	1,2 bsk	1.800.000.000	1.710.000.000	1.620.000.000	1.530.000.000	1.440.000.000	1.350.000.000	1.260.000.000	1.170.000.000	1.080.000.000	990.000.000	900.000.000

Tabel 7.2.

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai
Kebutuhan Pendanaan**



INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU

**LAPORAN HASIL REVIU
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA BANJARBARU
TAHUN 2022**

NOMOR : 700/066 /2021/INSPEKTORAT

TANGGAL : 22 JUNI 2021

DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara, penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- e. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/3153/SJ tanggal 27 Mei 2021 tentang Pelaksanaan Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atas Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rencana Keuangan Daerah Tahun 2022.

TUJUAN REVIU

Tujuan Reviu dokumen Rancangan Akhir Renja adalah untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan, bahwa :

- a. Informasi dalam Renja Tahun 2022 telah sesuai dengan RKPd Tahun 2022;
- b. Perumusan dokumen Rancangan Akhir Renja Tahun 2022 telah sesuai dengan tata cara dan kaidah-kaidah perencanaan antara lain pendekatan perencanaan terpadu, berbasis kinerja dan telah dilengkapi dengan dokumen pendukung.

RUANG LINGKUP REVIU

Ruang Lingkup Reviu mencakup pengujian terbatas terhadap dokumen Rancangan Akhir Renja Tahun 2022, untuk mengetahui konsistensi dokumen Rancangan Akhir RKPd Tahun 2022, meliputi :

- a. Kesesuaian rancangan akhir Renja dengan Perkada tentang RKPD;
- b. Kesesuaian substansi antar BAB pada rancangan akhir Renja;
- c. Kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir Renja;

SASARAN REVIU

Sasaran Reviu adalah memastikan bahwa rumusan Rancangan Akhir Renja Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru Tahun 2022 telah berpedoman pada RKPD Tahun 2022, dengan cara:

- a. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir Renja dengan Perkada tentang RKPD;
- b. Pengujian atas kesesuaian substansi antar BAB pada rancangan akhir Renja;
- c. Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir Renja.

METODOLOGI REVIU

- a. Reviu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi mengumpulkan dan melakukan penelaahan atas dokumen Rancangan Akhir Renja Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru Tahun 2022 serta wawancara dengan pejabat yang terkait proses penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru Tahun 2022.
- b. Reviu dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kota Banjarbaru Nomor : 700/139/ST/2021/Inspektorat Tanggal 7 Juni 2021 dengan susunan tim sebagai berikut:

Supervisor	:	Maridjo S.Sos
Ketua Tim	:	Andi Noor Rakhman, S.Sos
Anggota Tim	:	-

GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perangkat daerah wajib menyusun Renja yang merupakan penjabaran dari RKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman

kepada RKPD, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

VIII. URAIAN HASIL REVIU

Reviu dilakukan dengan meneliti dokumen Renja Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru Tahun 2022 dan dokumen rancangan akhir Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026, adapun hasil reviu yang didapatkan adalah:

a. Pengujian Atas Kesesuaian Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Dengan Rancangan Akhir RKPD

1. Pengujian atas kelengkapan dokumen pendukung RKPD (KKR A.1)

Berdasarkan hasil pengujian terhadap kelengkapan dokumen pendukung RKPD diketahui bahwa Rancangan Akhir RKPD yang disusun belum sepenuhnya didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai, seperti dokumen berikut:

- a) Sampai akhir Reviu, Rancangan akhir Perkada RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2022 belum ditetapkan sehingga tim reviu hanya melakukan pengujian kesesuaian Renja dengan rancangan akhir RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2022;
- b) Sampai akhir Reviu, Renstra Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru Tahun 2022 belum ditetapkan sehingga tim reviu hanya melakukan pengujian kesesuaian Renja dengan rancangan program dan kegiatan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2022 (tabel 6.1);
- c) Laporan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun sebelumnya telah dibuat tertanggal 5 Januari 2021 Surat Nomor 050/0029-Sunram/&Eva/Bappeda;
- d) Berita Acara Forum Perangkat Daerah Kota Banjarbaru tahun 2021 telah ditetapkan tertanggal penetapan 8 Juni 2021 Surat Nomor 050/303-Sunram/&Eva/Bappeda.
- e) Laporan Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan telah dibuat tanggal 8 Juni 2021 Surat Nomor 050/303-Sunram/&Eva/Bappeda.
- f) Berita acara Hasil Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah telah dibuat dengan tanggal penetapan tertanggal 29 Maret 2021.
- g) Berita acara Hasil Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah telah dibuat dengan tanggal penetapan tertanggal Tahun 2020.

h) Peraturan Menteri terkait SPM tidak ada mengingat pada Sekretariat DPRD tidak melaksanakan Pelayanan Dasar.

2. Pengujian atas kesesuaian rumusan sasaran perangkat daerah pada Bab III rancangan akhir Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan sasaran pada Bab IV yang ditetapkan dalam rancangan akhir RKPD (KKR A.2)

Rumusan sasaran perangkat daerah pada Bab III rancangan akhir Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan sasaran pada Bab IV yang ditetapkan dalam rancangan akhir RKPD.

b. Pengujian atas penyusunan substansi antar BAB rancangan akhir Renja

1. Pengujian kesesuaian tujuan dan sasaran Renja, program dan kegiatan pada Bab III Renja Perangkat Daerah didasarkan pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah pada Bab II rancangan akhir Renja Perangkat Daerah

a) Tujuan pada Renja Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru Tahun 2022 telah disusun sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah pada Bab II rancangan akhir Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022;

b) Sasaran pada Renja Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru Tahun 2022 telah disusun sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah pada Bab II rancangan akhir Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022;

c) Program dan kegiatan pada Renja Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru Tahun 2022 telah disusun sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah pada Bab II rancangan akhir Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022;

2. Pengujian kesesuaian kinerja kegiatan/ sub kegiatan mendukung kinerja program Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah

Dari 2 program, 13 kegiatan yang tercantum dalam Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 telah sesuai dengan kinerja program/kegiatan Renja dan kinerja program/kegiatan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2022.

c. Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir Renja.

Dari 2 program, 13 Kegiatan, indikator dan target kinerja dalam rancangan akhir Renja telah selaras atau sesuai.

IX. Simpulan :

Berdasarkan hasil revidi dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Rancangan Akhir RKPD yang disusun belum didukung dengan dokumen pendukung yang memadai, belum ditetapkannya Renstra Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 dan Renja Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru Tahun 2022;
- b. Rumusan sasaran perangkat daerah pada Bab III rancangan akhir Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan sasaran pada Bab IV yang ditetapkan dalam rancangan akhir RKPD;
- c. Tujuan, sasaran dan program pada Renja Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru Tahun 2022 telah disusun sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah pada Bab II rancangan akhir Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022;
- d. Dari 2 program, 13 kegiatan yang tercantum dalam Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 telah sesuai dengan kinerja program/kegiatan Renja dan kinerja program/kegiatan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2022.
- e. Dari 2 program, 13 kegiatan, indikator dan target kinerja dalam rancangan akhir Renja telah selaras atau sesuai.

X. Rekomendasi

Kepada Kepala Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru direkomendasikan agar segera menetapkan Renstra Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 dan Renja Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru Tahun 2022;

XI. APRESIASI

Inspektorat Kota Banjarbaru mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasama Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru sehingga kami dapat menyelesaikan seluruh kegiatan Reviu Rancangan Akhir Renja Tahun 2022.

Banjarbaru, 25 Juni 2021

Inspektur Kota Banjarbaru,



Drs. Rahmat Taufik, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700615 199003 1 006



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

INSPEKTORAT

Jl. Trikora No. 1 Gedung Serbaguna Lt-2 Telp./Fax. 0511-4780069 Banjarmasin Kode Pos 70713
E-mail: inspektorat@banjarbarukota.go.id

CATATAN HASIL REVIU
ATAS RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA BANJARBARU
TAHUN 2022

INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU

Disusun oleh/Tanggal Andi Noor Rakhman, S.Sos

Disetujui oleh/Tanggal Ketua Tim :
Andi Noor Rakhman, S.Sos

Supervisor : Maridjo, S.Sos

Sehubungan dengan penugasan Inspektur Kota Banjarbaru Nomor 700/139-ST/2021/Inspektorat untuk melaksanakan reviu atas rancangan akhir Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut :

PENGUJIAN ATAS KESESUAIAN RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN RANCANGAN AKHIR RKP

1. Pengujian kelengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan reviu rancangan akhir Renja Perangkat Daerah
 - a. Sampai akhir Reviu, Rancangan akhir Perkada RKP Kota Banjarbaru Tahun 2022 belum ditetapkan sehingga tim reviu hanya melakukan pengujian kesesuaian Renja dengan rancangan akhir RKP Kota Banjarbaru Tahun 2022;
 - b. Sampai akhir Reviu, Renstra Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru Tahun 2022 belum ditetapkan sehingga tim reviu hanya melakukan pengujian kesesuaian Renja dengan rancangan program dan kegiatan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2022 (tabel 6.1);
 - c. Laporan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun sebelumnya telah dibuat tertanggal 5 Januari 2021 Surat Nomor 050/0029-Sunram/&Eva/Bappeda;
 - d. Berita Acara Forum Perangkat Daerah Kota Banjarbaru tahun 2021 telah ditetapkan tertanggal penetapan 8 Juni 2021 Surat Nomor 050/303-Sunram/&Eva/Bappeda .
 - e. Laporan Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan telah dibuat tanggal 8 Juni 2021 Surat Nomor 050/303-Sunram/&Eva/Bappeda .
 - f. Berita acara Hasil Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah telah dibuat dengan tanggal penetapan tertanggal Tahun 2020.

- g. Peraturan Menteri terkait SPM tidak ada mengingat pd DPRD tidak melaksanakan Pelayanan Dasar.
2. Pengujian kesesuaian rumusan sasaran perangkat daerah pada Bab III rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dengan sasaran pada Bab IV yang ditetapkan dalam rancangan akhir RKPD
Rumusan sasaran perangkat daerah pada Bab III rancangan akhir Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan sasaran pada Bab IV yang ditetapkan dalam rancangan akhir RKPD.

B. PENGUJIAN ATAS PENYUSUNAN SUBSTANSI ANTAR BAB RANCANGAN AKHIR PERANGKAT DAERAH

1. Pengujian kesesuaian tujuan dan sasaran Renja, program dan kegiatan pada Bab III Renja Perangkat Daerah didasarkan pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah pada Bab II rancangan akhir Renja Perangkat Daerah
 - a. Tujuan pada Renja Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru Tahun 2022 telah disusun sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah pada Bab II rancangan akhir Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022;
 - b. Sasaran pada Renja Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru Tahun 2022 telah disusun sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah pada Bab II rancangan akhir Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022;
 - c. Program dan kegiatan pada Renja Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru Tahun 2022 telah disusun sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah pada Bab II rancangan akhir Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022;
2. Pengujian kesesuaian kinerja kegiatan / sub kegiatan mendukung kinerja program Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah
Dari 2 program, 13 kegiatan yang tercantum dalam Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 telah sesuai dengan kinerja program/kegiatan Renja dan kinerja program/kegiatan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2022.

C. PENGUJIAN ATAS PENYUSUNAN SUBSTANSI ANTAR BAB RANCANGAN AKHIR PERANGKAT DAERAH

Dari 2 program, 13 kegiatan, indikator dan target kinerja dalam rancangan akhir Renja telah selaras atau sesuai.

REKOMENDASI :

Direkomendasikan kepada Kepala Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru agar segera :

1. Melakukan penetapan Rensta Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026;
2. Melakukan penetapan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022;

Banjarbaru, 25 Juni 2021

Inspektur Kota Banjarbaru,



Drs. Rahmat Taufik, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700615 199003 1 006